

Implementasi Konsep Inklusi Sosial di Perguruan Tinggi; sebuah wacana¹

Dian Arya Susanti¹

E-mail: dian.arya.s@upi.edu

Abstrak

Implementasi konsep inklusi sosial di perpustakaan bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi penerapannya di Perpustakaan Perguruan Tinggi masih belum banyak dibahas oleh para peneliti. Artikel ini mencoba melihat konsep-konsep terkait hal tersebut dengan melakukan studi pustaka dari sumber-sumber yang ada. Penulis berkesimpulan bahwa inklusi sosial di perpustakaan bukanlah sesuatu yang baru, melainkan hal yang sudah lama dilakukan oleh perpustakaan. Perbedaannya hanya terletak pada faktor partisipasi pemustaka sehingga mereka bisa menjadi bagian dari masyarakat dunia.

Kata kunci: perpustakaan perguruan tinggi, layanan informasi, inklusi sosial

Abstract

The implementation of the concept of social inclusion in the library is not something new, but its application in the University Library is still not widely discussed by the researchers. This article tries to look at the concepts related to this by conducting literature studies from existing sources. The authors conclude that social inclusion in the library is not something new; it has long been done by the library. The difference lies on the factors of participation of the users so that they can become part of the world community.

Keywords: academic library, information services, social inclusion

Pendahuluan

Perpustakaan merupakan sebuah tempat yang senantiasa menyediakan berbagai data, informasi, dan pengetahuan yang bisa digunakan oleh siapa saja tanpa melihat strata sosial seseorang. Semua layanan dan fasilitas yang disediakan, bisa diakses oleh semua pemustaka, baik aktif maupun potensial. Konsep ini digaungkan oleh IFLA dalam dokumen “*Access and Opportunity for All*”, yang diselenggarakan untuk mendukung *Sustainability Development Goals* (SDGs) (International Federation of Library Associations and Institutions, 2018). Sasaran SDGs ini terdiri dari:

- *End poverty in all its forms everywhere.*
- *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*
- *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*
- *Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.*
- *Achieve gender equality and empower all women and girls.*
- *Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all*
- *Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.*
- *Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.*
- *Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation*
- *Reduce income inequality within and among countries.*
- *Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable.*

¹ Pustakawan Ahi Muda pada Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia

- *Ensure sustainable consumption and production patterns*
- *Take urgent action to combat climate change and its impacts by regulating emissions and promoting developments in renewable energy*
- *Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.*
- *Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.*
- *Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.*

Dari dokumen di atas, ada satu hal yang bisa digarisbawahi, yaitu perpustakaan akan sangat berperan dalam penyediaan informasi dan kemudahan aksesnya, kepada siapa saja, tanpa melihat strata sosialnya. Perpustakaan akan bisa membantu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dengan menyediakan informasi mengenai bursa kerja. Perpustakaan juga bisa membantu peningkatan kesehatan masyarakat dengan menyediakan informasi mengenai higienitas dan penanggulangan penyakit. Dan banyak lagi hal lain yang bisa dilakukan perpustakaan untuk mendukung program SDGs.

Hal yang menjadi masalah adalah ketika masyarakat yang datang ke perpustakaan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengakses informasi yang ada. Dengan ketidakmampuan mengoperasikan perangkat digital, maka terputuslah jembatan yang akan menghubungkannya ke dunia informasi yang secara tidak langsung memutuskan jalannya juga ke arah kesejahteraan, ini dinamakan eksklusi sosial.

Pada awal era digital, orang akan mengalami eksklusi bila tidak mampu membeli perangkat digital. Namun, dengan semakin terjangkaunya harga perangkat digital, tidak lantas membuat orang terbebas dari *digital divide*. Mark Warschauer dalam bukunya yang berjudul *Technology and Social Inclusion*, berpendapat bahwa;

“...what is at stake is not access to ICT in the narrow sense of having a computer on the premises but rather access in much wider sense of being able to use ICT for personally or socially meaningful ends” (Warschauer, 2003).

Jadi, kemampuan/ketidakmampuan seseorang dalam mempergunakan perangkat digital pun bisa menyebabkan *digital divide*. Lebih lanjut, Warschauer (2003, p.125) mengatakan bahwa akses terhadap internet bisa membantu seseorang (pembelajar) dalam memecahkan masalah-masalahnya, termasuk perihal ketidaksetaraan sosial. Senada dengan pendapat Warschauer, Hamilton dan Pors (Hamilton & Pors, 2007) dalam artikelnya juga menyatakan bahwa kebebasan dalam memperoleh informasi bisa berdampak pada kebebasan berekspresi, yang hasil akhirnya akan berdampak pada inklusi sosial.

Inklusi Sosial dan Perpustakaan

Konsep inklusi sosial pertama kali muncul pada tahun 1970-an di Prancis sebagai respon terhadap krisis kesejahteraan di negara-negara Eropa, yang memiliki dampak yang meningkat pada kerugian sosial di Eropa. Konsep ini menyebar ke seluruh Eropa dan Inggris sepanjang tahun 1980-an dan 90-an. Konsep ini mendapatkan perhatian yang luas setelah dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi *World Summit for Social Development*, Copenhagen, Denmark, 6-12 March 1995 atau dikenal dengan *Copenhagen Declaration on Social Development*. Deklarasi pembangunan sosial ini menekankan pada konsensus program aksi baru tentang perlunya menempatkan

masyarakat di pusat pembangunan. Pelibatan masyarakat dalam setiap aspek pembangunan dalam menunaikan hak-haknya ini disebut inklusi sosial.

The Canadian Urban Library Council (CULC) memberikan definisinya mengenai inklusi sosial sebagai “...*the participatory, authentic, and accountable manner in which institutions uphold and reinforce the principles of access, equity and, as a result, social inclusion for all.*” (Canadian Urban Council Libraries, 2010). Ketika sebuah institusi melaksanakan prinsip partisipatori dan menyediakan akses secara berimbang terhadap semua orang, maka hasil akhir dari kegiatan institusi tersebut adalah pelaksanaan inklusi sosial.

Menurut klasifikasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendagri PMK) ada enam kelompok masyarakat yang sangat mungkin terkena eksklusi sosial. Keenam kelompok tersebut yaitu korban diskriminasi, intoleransi dan kekerasan berbasis agama; korban pelanggaran HAM berat; waria; masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber daya alam; disabilitas; dan anak dan remaja rentan (Azyumardi Azra, 2016). Bila perpustakaan bisa menjamin partisipasi dan akses terhadap informasi bagi enam kelompok masyarakat ini, maka perpustakaan dapat disebut berbasis inklusi sosial.

Paul Sturges dalam Mallawa (Suharyanto Mallawa, 2019) mendefinisikan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai Perpustakaan yang bisa memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan mempertimbangkan keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya serta Hak Asasi Manusia.

Di Inggris, telah dibuat dokumen pedoman untuk mengimplementasikan inklusi sosial di Perpustakaan Umum, yang termasuk juga didalamnya panduan bagi pembuat kebijakan lokal untuk mendukung program ini. Dalam dokumen tersebut disebutkan juga beberapa faktor yang bisa menjadi penghambat bagi berjalannya program ‘inklusi sosial’ di Perpustakaan, yaitu:

- a. Penghambat dari dalam institusi perpustakaan itu sendiri, seperti jam buka yang terlalu restriktif, adanya larangan-larangan tertentu dalam mengakses layanan perpustakaan, sikap staf atau pustakawan yang kurang ramah, regulasi yang terlalu ketat, aturan denda yang tidak fleksibel terutama bagi mereka yang kurang mampu, kebijakan penyediaan buku yang kurang sesuai dengan kebutuhan komunitas, baik judul, subjek maupun formatnya, kurangnya penanda penunjuk arah di dalam perpustakaan sehingga sulit untuk menemukan apa yang dibutuhkan, serta kurang bulatnya kebijakan yang dibuat terkait layanan dan fasilitas untuk pemustaka disabilitas.
- b. Hambatan yang datang dari dalam diri pemustaka itu sendiri, seperti kurangnya kemampuan dasar dalam membaca, menulis dan berkomunikasi, penghasilan yang rendah, diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, kurangnya hubungan sosial, rendahnya kepercayaan diri, dan tidak memiliki alamat yang tetap (*homeless*).
- c. Hambatan yang datang dari persepsi bahwa “perpustakaan itu bukan untuk umum”, yang sangat mungkin dibentuk baik oleh diri pemustaka itu sendiri maupun oleh komunitas lingkungan si pemustaka, yang biasanya berpendidikan rendah, hidup terisolasi, atau mereka yang merasa bahwa perpustakaan tidak relevan dengan pemenuhan kebutuhan mereka serta tidak faham bagaimana menggunakan layanan dan fasilitas yang tersedia.

- d. Hambatan yang muncul dari lingkungan dimana pemustaka itu tinggal, misalnya kesulitan akses secara fisik baik menuju maupun di dalam tempat tinggalnya, hunian bermasalah, atau terisolasi secara geografis sehingga akses terhadap transportasi menjadi sulit. (*Libraries for All: Social Inclusion in Public Libraries Policy Guidance for Local Authorities in England*, 1999)

Untuk mengatasinya, dokumen yang sama juga menjelaskan beberapa kebijakan yang harus diambil, yaitu;

- a. Inklusi sosial harus diutamakan sebagai prioritas kebijakan untuk layanan perpustakaan dan informasi.
- b. Otoritas perpustakaan harus mempertimbangkan layanan spesifik apa yang perlu dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok dan komunitas minoritas.
- c. Otoritas perpustakaan harus berkonsultasi dan melibatkan kelompok yang dikecualikan secara sosial untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi mereka.
- d. Perpustakaan harus berlokasi di mana ada permintaan, juga harus membangun di atas fasilitas dan layanan yang ada sedapat mungkin.
- e. Jam buka harus lebih fleksibel dan disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan dan minat masyarakat.
- f. Layanan perpustakaan dan informasi harus mengembangkan peran mereka sebagai pusat sumber daya masyarakat, serta menyediakan akses ke komunikasi dan informasi.
- g. Otoritas perpustakaan harus mempertimbangkan kemungkinan penempatan fasilitas bersama dengan layanan lain yang disediakan oleh otoritas setempat.
- h. Perpustakaan harus menjadi tempat belajar bagi pembelajar mandiri.
- i. Perpustakaan harus menjadi sarana utama untuk menyediakan akses TIK yang terjangkau (atau lebih disukai gratis) di tingkat lokal.
- j. Bermitra dengan organisasi pembelajaran lainnya.
- k. Otoritas perpustakaan harus mempertimbangkan apakah beberapa layanan mungkin lebih efektif diberikan dalam basis regional (*Libraries for All: Social Inclusion in Public Libraries Policy Guidance for Local Authorities in England*, 1999)

Panduan ini dibuat oleh Pemerintah Inggris Raya untuk bisa digunakan oleh semua Perpustakaan Umum yang ada di kawasannya. Selama ini, implementasi konsep inklusi sosial hanya terbatas pada perpustakaan umum saja, karena memang jenis perpustakaan ini memiliki pemustaka yang heterogen. Hal ini senada dengan pendapat dari Kennan, Lloyd dan Qayyum (Kennan, Lloyd, & Qayyum, n.d.), Noh (Noh, 2019), Robinson (Robinson, 2016), Echezona, Osabede dan Asogwa (Echezona, R .I, Osadebe, N,Asogwa, 2011), Ashraf (Ashraf, 2018), Jaeger (Jaeger et al., 2014), dan Usherwood (Bob Usherwood, 2007).

Sampai tulisan ini diselesaikan, penulis belum bisa menemukan artikel ataupun tulisan yang membahas mengenai implementasi konsep inklusi sosial di perpustakaan selain Perpustakaan Umum. Apakah tidak bisa? Mengapa tidak? Berangkat dari pertanyaan ini, penulis akan mencoba melihat kemungkinan implementasi konsep inklusi sosial selain di Perpustakaan Umum, khususnya di perpustakaan perguruan tinggi.

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2014 mendefinisikan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagai "...bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan

yang berkedudukan di Perguruan Tinggi.” (Kemenhukham, 2014).

Definisi lainnya disebutkan oleh Alire dan Evans dalam buku “*Academic Librarianship*” seperti berikut ini;

“An academic library is defined as an entity in a postsecondary institution that provides all of the following: An organized collection of printed or other materials, or combination thereof; a staff trained to provide and interpret such materials as required to meet the informational, cultural, recreational, or educational needs of the clientele, and the physical facilities necessary to support such collections, staff, and schedule.” (Alire & Evans, 2010).

Dari dua definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah sebuah entitas yang menjadi bagian integral sebuah institusi Perguruan Tinggi, yang bertugas untuk menjadi pusat sumber belajar dengan menyediakan koleksi yang terorganisir dengan baik, staf yang terlatih untuk menyediakan informasi yang tepat, serta memiliki fasilitas fisik yang diperlukan untuk mendukung aktifitas-aktifitas tersebut.

Sulistyo Basuki dalam “Pengantar Ilmu Perpustakaan” menyebutkan lima tujuan Perpustakaan Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Memenuhi keperluan informasi masyarakat perguruan tinggi, lazimnya staf pengajar dan mahasiswa. Sering pula mencakup tenaga administrasi perguruan tinggi.
2. Menyediakan bahan pustaka rujukan (referensi) pada semua tingkat akademis, mulai dari mahasiswa tahun pertama hingga ke mahasiswa program pasca sarjana dan pengajar.
3. Menyediakan ruangan belajar untuk pemakai perpustakaan (pemustaka)
4. Menyediakan jasa peminjaman yang tepat guna bagi berbagai jenis pemakai.

5. Menyediakan jasa informasi aktif, yang tidak saja terbatas pada lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga lembaga industri lokal (Sulistyo Basuki, 1993)

Kekhasan koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah subjek koleksinya yang sangat ilmiah, karena tujuan pengadaannya adalah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar serta penelitian bagi *civitas academica*. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, koleksi ilmiah ini mengalami perubahan bentuk, dari koleksi tercetak menjadi digital. Efek sampingnya adalah adanya ‘kewajiban’ bagi perpustakaan untuk menyediakan peralatan pendukung yang memadai untuk pembacaan berbagai koleksi digital ini.

Seperti yang sudah disinggung pada awal tulisan ini, bahwa kurangnya kemampuan untuk menggunakan *gadget* dalam mengakses informasi adalah salah satu penyebab eksklusi sosial (Warschauer, 2003). Warschauer juga menyatakan bahwa sebenarnya literasi dan aksesibilitas terhadap ICT memiliki banyak kemiripan sehingga “...the access to ICT, broadly defined, can help determine the difference between marginalization and inclusion in this new socioeconomic era” (Warschauer, 2003). Terkait perkembangan akses informasi melalui teknologi ICT yang semakin canggih, maka sangat mungkin di Perpustakaan Perguruan Tinggi pun terjadi eksklusi sosial bagi para *civitas academica*, terutama mereka yang terlahir sebagai generasi *Baby Boomer*.

Kasus di atas hanya secuil dari apa yang mungkin terjadi terkait eksklusi sosial di perguruan tinggi. Akhir-akhir ini, beberapa Perpustakaan Perguruan Tinggi mulai membuka pintu-pintunya bagi masyarakat umum. Selain itu, melihat tujuan yang dipaparkan oleh Sulistyo Basuki, bahwa Perpustakaan Perguruan Tinggi juga harus mampu menyediakan layanan informasi bagi pelaku industri lokal-- maka tentunya sangat

mungkin terjadi *gap* yang lebar yang disebabkan oleh semakin canggihnya teknologi informasi. Belum lagi masalah nuansa koleksi yang semakin luas agar bisa mengakomodir semua pemustaka yang berkeinginan menggunakan Perpustakaan Perguruan Tinggi untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan. Maka, sudah saatnya Perpustakaan Perguruan Tinggi mempertimbangkan implementasi konsep inklusi sosial dalam perencanaan kebijakan-kebijakannya.

Inklusi Sosial di Perpustakaan Perguruan Tinggi

Konsep layanan semua jenis perpustakaan adalah demokrasi, dimana semua orang akan dilayani dengan koleksi, alat dan staf yang sama tanpa melihat status, kedudukan, jabatan maupun agama dan ras. Sebuah konsep layanan yang rawan ketidaksetaraan sangat mungkin terjadi di semua jenis perpustakaan, termasuk perpustakaan perguruan tinggi.

Konsep ketidaksetaraan (*inequality = social exclusion*) di Perpustakaan Perguruan Tinggi bisa dilihat ketika terdapat pemustaka yang berkebutuhan khusus tidak bisa mengakses fasilitas yang tersedia. Atau seperti yang sudah disinggung di atas, misalnya ketika generasi *baby boomers* mengalami kesulitan dalam mengakses *ICT tools* untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Ini hanya contoh-contoh yang berkaitan dengan pemustaka aktual Perpustakaan Perguruan Tinggi, belum lagi bicara mengenai layanan terhadap komunitas sekitar dan pelaku industri lokal, yang dengannya, mejadi semakin luas cakupan nuansa layanan yang harus diberikan oleh perpustakaan. Maka dari itu, implementasi konsep inklusi sosial menjadi penting.

Dari manual *Libraries for All* (1999), ada beberapa poin penting yang bisa diambil dalam menentukan kebijakan terkait

implementasi konsep inklusi sosial, terutama di Perpustakaan Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Perpustakaan harus benar-benar mengenal siapa pemustakanya, sehingga bisa menentukan jenis pemustaka mana yang merupakan mayoritas, dan mana yang merupakan minoritas serta memerlukan perlakuan khusus. Di Perpustakaan Perguruan Tinggi, yang seringkali terjadi adalah *language gap* atau yang generasi milenial sering sebut, “*roaming*”. Karena sistem penerimaan mahasiswa tidak terbatas pada sistem zonasi, maka sangat mungkin mahasiswa yang menjadi pemustaka memiliki keterbatasan bahasa dalam mengakses sumber informasi. Untuk itu diperlukan layanan khusus bagi mereka agar memiliki aksesibilitas yang sama dengan yang lainnya. Bentuk layanan bisa berupa petugas khusus yang menguasai berbagai bahasa, atau yang diperlengkapi dengan aplikasi penterjemah langsung. Keberadaan *signage* yang terdiri dari minimal dua bahasa juga sangat baik untuk memfasilitasi aksesibilitas.
2. Perlu dipersiapkan fasilitas perpustakaan yang bisa benar-benar mendukung semua jenis pemustaka, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Bagi mereka yang tuna daksa, akan sangat baik bila perpustakaan memiliki jalur landai di setiap bagian perpustakaan agar bisa diakses oleh kursi roda. *Signage* dengan huruf *braille* bagi mereka yang memiliki gangguan penglihatan juga akan sangat membantu. Penyediaan fasilitas di Perpustakaan Perguruan Tinggi saat ini mengalami metamorfosa, dari yang semula hanya melayani *civitas academica* dalam melakukan proses pembelajaran dan riset, menjadi sebuah institusi yang bisa menyediakan tempat bagi *civitas* dan komunitas untuk berdiskusi, berkumpul dan beraktivitas. Hal ini tentunya menjadi sebuah pro dan kontra, seperti yang dijelaskan oleh Jeffrey T. Gayton (2008), “*Efforts to*

create a more social academic library threaten this communal spirit and may do more harm than good (communal as in traditional academic library)". Maka dari itu, perpustakaan harus berhati-hati dalam memilih desain dan pengadaan fasilitas perpustakaan, agar tidak menghilangkan ciri akademik dari Perpustakaan Perguruan Tinggi, tetapi tetap bisa mengakomodasi kebutuhan semua jenis pemustaka.

3. Harus diyakinkan bahwa semua jenis pemustaka benar-benar bisa mengakses semua fasilitas dan layanan yang tersedia di perpustakaan. Bagi pemustaka yang berkebutuhan khusus, seperti misalnya memiliki gangguan penglihatan, bisa disediakan petugas "pembaca" yang akan membantu mereka mencari dan "membaca" informasi yang mereka butuhkan, atau dengan menyediakan komputer-komputer dengan aplikasi khusus. Begitupun mereka yang memiliki gangguan pendengaran ataupun daksa.
4. Perpustakaan harus bersedia menjalin kerjasama yang baik dengan komunitas-komunitas pembelajar dari berbagai kalangan, dalam mendukung terbentuknya generasi *life long learner*. Dalam hal ini, Perpustakaan Perguruan Tinggi harus membuka diri untuk berbagai jenis kerjasama, baik dari perguruan tinggi lainnya maupun dengan komunitas pembelajar yang membutuhkan akses terhadap informasi yang dimiliki.

Melihat pengejawantahan konsep yang diberikan oleh panduan *Libraries for All*, penulis memaknai bahwa praktik inklusi sosial sudah lama dipraktikkan di perpustakaan dengan sebutan yang bermacam-macam, mulai dari layanan prima, layanan khusus, maupun layanan cinta. Praktiknya sama, dimana perpustakaan menyediakan layanan berdasarkan kebutuhan informasi pemustaka, bukan dari latar

belakang pendidikan, tingkat ekonomi, jabatan, agama, suku, ras maupun ideologi.

Yang menjadi faktor pembeda dan masih perlu ditingkatkan adalah faktor partisipatori pemustaka, dimana seharusnya pemustaka bisa punya andil dalam menentukan arah kebijakan perpustakaan dalam porsi yang proporsional. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan pemanfaatan *database* pemustaka dan transaksi yang dilakukannya untuk menentukan arah pengembangan koleksi pada tahun berikutnya. Atau dengan pemanfaatan survey kepuasan dan keluhan pemustaka untuk menentukan kebijakan layanan yang sebaiknya diambil atau justru tidak diambil.

Lebih dari itu, pustakawan juga seharusnya lebih jauh mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi terutama pada poin pengabdian pada masyarakat yakni dengan mengembangkan layanan serta advokasi literasi dan minat baca seluas-luasnya, terutama bagi masyarakat yang ada di sekitar lokasi perguruan tinggi. Bentuknya bisa berupa pelatihan-pelatihan atau workshop terkait literasi, baik dengan meraih para bunda literasi maupun pemuda karang taruna. Atau yang lebih luas lagi, mewujudkan layanan terbuka. Dengan demikian, pemustaka juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan di Perpustakaan Perguruan Tinggi, yang bisa mengembangkan potensi diri pemustaka tersebut secara maksimal, dan menjadi bagian dari masyarakat dunia yang senantiasa belajar sepanjang hayat. Hal ini sesuai dengan pendapat Kennan dkk (2014) bahwa, "*Social Inclusion requires an ability to develop effective information practices that enable connection to compliance, making available everyday and nuanced information landscape which need to be accessed and understood in order to participate in their adopted community.*"

Penutup

Perpustakaan adalah jantung pendidikan tinggi. Bila jantungnya sehat, maka sehat pula pendidikan, begitupun sebaliknya. Meski kiasan ini masih jauh api dari arang, tetapi Perpustakaan Perguruan Tinggi harus tetap berusaha menjadi yang terbaik dalam menjadi mitra sejajar dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu dari usaha yang bias dilakukan adalah dengan mengimplementasikan konsep inklusi sosial, yang sebenarnya sudah dikenal sejak lama, akan tetapi hadir kembali dengan nama baru. Seperti yang tercantum pada judul, tulisan ini merupakan sebuah studi pendahuluan, sehingga sangat terbuka terhadap riset lebih lanjut terkait implementasi konsep inklusi sosial di perpustakaan perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Alire, C. A., & Evans, G. E. (2010). *Academic Librarianship* (1st Editio). New York: Neal-Schuman Publishers, Inc.
- Ashraf, T. (2018). Transforming Libraries into Centers of Community Engagement : Towards Inclusion , Equality & Empowerment. *Libraries as Centers of Community Engagements for Development 22-23 August 2018 Kuala Lumpur, Malaysia*, 1–11.
- Azyumardi Azra. (2016). Inklusi Sosial; Enam Kelompok. Retrieved May 4, 2019, from Republika Online website: <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/09/21/oduyvf319-inklusi-sosial-enam-kelompok>
- Bob Usherwood. (2007). *EQUITY AND EXCELLENCE IN THE PUBLIC LIBRARY: Why Ignorance is Not our Heritage*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
- Canadian Urban Council Libraries. (2010). *Social Inclusion Audit*. Canada: UCLC.
- Echezona, R .I, Osadebe, N,Asogwa, B. E. (2011). Library Services to the Physically Challenged : Nature , Challenges and Strategies. *Journal of Applied Information Science and Technology*, 1(5), 14–18.
- Gayton, J. T. (2008). Academic Libraries: “Social” or “Communal?” The Nature and Future of Academic Libraries. *The Journal of Academic Librarianship*, 34(1), 60–66. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2007.11.011>
- Hamilton, S., & Pors, N. O. (2007). Theme article Freedom of access to information and freedom of expression : the Internet as a tool for global social inclusion. *Library Management*, 24(8/9), 4017–4416. <https://doi.org/10.1108/01435120310501086>
- International Federation of Library Associations and Institutions. (2018).

- Access and opportunity for all* (p. 25 hlm.). p. 25 hlm. Retrieved from <https://www.ifla.org/publications/node/10546>
- Jaeger, P. T., Gorham, U., Taylor, N. G., Kettlich, K., Sarin, L. C., & Peterson, K. J. (2014). Library Research and What Libraries Actually Do Now: Education, Inclusion, Social Services, Public Spaces, Digital Literacy, Social Justice, Human Rights, and Other Community Needs. *Library Quarterly*, 84(4), 491–493.
- KEMENHUKHAM. *No Title*. , Pub. L. No. No.24 tahun 2014 (2014).
- Kennan, M. A., Lloyd, A., & Qayyum, A. (2014). *Settling in: The Relationship between Information and Social Inclusion* *Settling in: The RELATIONSHIP between INFORMATION and social inclusion*. (October 2014), 37–41. <https://doi.org/10.1080/00048623.2011.1072232>
- Libraries for All: Social Inclusion in Public Libraries Policy Guidance for Local Authorities in England*. (1999). London.
- Noh, Y. (2019). *A comparative study of public libraries ' contribution to digital inclusion in Korea and the United States*. <https://doi.org/10.1177/0961000616668571>
- Robinson, L. T. K. (2016). *Libraries , human rights and social justice : enabling access and promoting inclusion*. 8623(June). <https://doi.org/10.1080/00048623.2016.1162269>
- Suharyanto Mallawa. (2019). Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Retrieved June 10, 2019, from www.kompasiana.com website: <https://www.kompasiana.com/mallawa/5c710979aeebe13c2f5af5c9/tranformasi-perpustakaan-berbasis-inklusi-sosial?page=all>
- Sulistyo Basuki. (1993). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama.
- Warschauer, M. (2003). *Technology and Social Inclusion; rethinking the digital divide*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.